

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1993)
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*, (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, 2008)
- Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016)
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Purmo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

B. Peaturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto, Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Bancak Kariang, Pemerintahan Nagari Persiapan Mudiak Labuah, Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikek, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Sepakat, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Saiyo, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sigunanti, Pemerintahan Nagari Persiapan Bandua Balai, Pemerintahan Nagari Persiapan Bunuik, Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Candu, Pemerintahan Nagari Persiapan Limau Puriuk, Dan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

C. Jurnal

Afwadi, *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara*, Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Vol 9, No 1 (Batu Sangkar, 2010).

Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, *Model Intervensi Negara Pada Nagari Di Sumatera Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah Dengan Menggunakan Pendekatan Elite Dan Distribusi Kekuasaan* , Jurnal Universitas Andalas Vol 15, No 1, (Padang, 2013).

